

TAFSIR AYAT POLITIK PERSPEKTIF NADIRSYAH HOSEN

Rangga Nurseta

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
nursetarangga@gmail.com

M. Irfan Riyadi

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Irfanriyadi67@gamil.com

Abstract : *Politics is basically a phenomenon in society that is always related to humans. Political struggles in human life are always changing according to the times. The development of the times in the form of information technology provides an impetus in contributing to the interpretation of the Qur'an regarding contemporary political dynamics. Therefore, political dynamics are needed that are able to harmonize social norms with religion, and Nadirsyah Hosen has an important role through his field of interpretation. So, this research discusses the method of interpretation, the criteria of the leader and the relevance of the interpretation. The researcher uses the library research with a contextual approach in reviewing this research. The success in this research is supported by studying 6 verses of the Qur'an related to politics which are interpreted by Nadiryah Hosen in the form of Al-Maidah (51), An-nisa' (138-139), An-Nisa' (59), Al -Maidah (44, 45, 47), An-Nisa (108) and An-Nur (55). The results of this study explain that in interpreting political verses, Nadirsyah Hosen uses the thematic method (maudhu'i) with adabi al-ijtima'i style. In interpreting the verse about leadership, it is explained that there is no special requirement that the leader must be a Muslim. However, people who are able to uphold justice, are responsible and trustworthy. Meanwhile, in interpreting verses about power, the focus is more on criticizing the politicization of interpretations that discuss Al-Maidah (51) related to non-Muslim leadership, An-nisa' (138-139) on Pilkada and An-Nisa (108) regarding KPU.*

Keywords: *Tafsir, Nadirsyah Hosen, Politics*

Abstrak : Politik pada dasarnya merupakan fenomena dalam masyarakat yang selalu berkaitan dengan manusia. Pergulatan politik dalam kehidupan manusia selalu mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zaman berupa teknologi informasi memberikan sebuah dorongan dalam kontribusi penafsiran Al-Qur'an mengenai dinamika politik kekinian. Oleh karena itu, diperlukan dinamika politik yang mampu menyelaraskan norma-norma sosial dengan agama, dan Nadirsyah Hosen memiliki peran penting melalui bidang penafsirannya. Maka, penelitian ini membahas tentang metode penafsiran, kriteria pemimpin dan relevansi tafsirnya. Peneliti menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kontekstual dalam mengkaji penelitian ini. Keberhasilan dalam penelitian ini, didukung dengan mengkaji 6 ayat Al-Qur'an berkaitan dengan politik yang ditafsirkan oleh

Nadiryah Hosen berupa Al-Maidah (51), An-nisa' (138-139), An-Nisa' (59), Al-Maidah (44, 45, 47), An-Nisa (108) dan An-Nur (55). Hasil penelitian ini, menjelaskan bahwa dalam melakukan penafsiran ayat politik Nadirsyah Hosen menggunakan metode tematik (maudhu'i) dengan corak *adabi al-ijtima'i*. Dalam menafsirkan ayat tentang kepemimpinan, dijelaskan bahwa tidak ada syarat khusus bahwa pemimpin harus dari orang Islam. Akan tetapi, orang yang mampu menjunjung tinggi keadilan, bertanggung jawab dan amanah. Sedangkan dalam menafsirkan ayat-ayat tentang kekuasaan, lebih fokus dalam mengkritisi terjadinya politisasi tafsir yang membahas mengenai Al-Maidah (51) terkait kepemimpinan non-muslim, An-nisa' (138-139) tentang Pilkada dan An-Nisa (108) tentang KPU.

Kata Kunci : Tafsir, Nadirsyah Hosen, Politik

PENDAHULUAN

Akar kata politik berasal dari bahasa Yunani “Polis” yang memiliki makna “Negara kota”. Pada zaman kejayaan bangsa Yunani, Negara-Kota merupakan orang-orang yang berinteraksi antara satu dengan yang lainnya untuk meraih kesejahteraan dalam mengarungi roda kehidupan. Oleh karena itu, manusia mencoba menentukan posisi/kedudukannya dalam masyarakat, manakala mereka berusaha meraih kesejahteraan pribadi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam masyarakat maupun yang ada di sekitarnya. Atau mereka akan mencoba memberikan pengaruh kepada orang lain agar mau menerima pandangan serta menuruti kemauan yang diinginkan, maka mereka akan disibukkan dengan suatu kegiatan yang kita namai dengan Politik.¹

Pemahaman mengenai politik tersebut merupakan sebuah upaya guna mempengaruhi orang lain agar mereka mau menerima pandangan serta pendapatnya, maka mereka akan mengikuti segala permintaan yang mempengaruhinya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Pengaruh politik tersebut bisa dianalogikan dengan pasangan suami istri yang bersaing dengan tetangga untuk mendapatkan suara masyarakat dalam pemilihan ketua Rt. Mereka akan bersaing untuk mempengaruhi masyarakat agar mengikuti serta mendukungnya dalam kegiatan pemilihan ketua Rt tersebut. Dengan demikian, muncul sebuah kegiatan dalam masyarakat dengan cara saling mempengaruhi untuk mendapatkan perhatian khusus yang mengarah kepada kekuasaan politik.²

Berbicara mengenai kekuasaan politik, terdapat satu prinsip penting yang harus dipegang teguh oleh seorang penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, yaitu keadilan. Membahas mengenai keadilan seorang John Rawls memiliki pemikiran mengenai prinsip keadilan dalam berpolitik, yang dalam melakukan kegiatan politik menurut beliau harus memperhatikan dua prinsip penting mengenai keadilan. *Pertama*, prinsip kebebasan yang sama. Dalam berpolitik memiliki kebebasan untuk berpartisipasi merupakan sebuah hal mutlak yang dimiliki oleh semua orang, baik itu warga sipil maupun pejabat negara. *Kedua*, tentang prinsip perbedaan dan prinsip kesamaan.

¹ Hasbullah Bakry, *Sistematik Filsafat*, (Jakarta: Wijaya, 1981), 9.

² Ibid, 10.

Prinsip perbedaan disini maksudnya adalah bahwa perbedaan sosial ekonomi harus diukur sesuai dengan kondisi masyarakat agar memberikan manfaat yang besar. Hal tersebut terjadi karena perbedaan kesejahteraan ekonomi maupun sosial dari berbagai kondisi masyarakat sekarang. Sedangkan prinsip kesamaan merupakan sebuah persamaan yang adil atas berbagai kesempatan yang ada. Maksudnya, ketidaksamaan sosial ekonomi yang sedemikian rupa harus diatur sebaik mungkin agar tercipta kesamaan kedudukan sebagai warga negara Indonesia. Sehingga seluruh masyarakat dari berbagai kondisi sosial ekonomi yang berbeda-beda memiliki kesempatan yang sama di mata hukum.³

Keadilan merupakan sebuah prinsip penting yang harus dipahami oleh seorang muslim tanpa memandang perbedaan ras, suku, budaya maupun agama. Islam sendiri juga mengedepankan prinsip keadilan dalam bertindak. Prinsip keadilan juga tertera dalam butir ketiga pancasila yang mengatakan bahwa seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan keadilan yang sama tanpa terkecuali.⁴ Akan tetapi, melihat dari kondisi politik di Indonesia saat ini prinsip keadilan yang seharusnya dipegang teguh oleh penguasa mulai memudar. Dibuktikan dengan adanya tindakan anarkis baik secara psikis maupun fisik, seperti menjatuhkan lawannya dengan segala cara maupun mengintimidasi rakyat agar mau menjadi pendukungnya. Apalagi dengan adanya ujaran kebencian yang dilakukan oleh politisi dalam media sosial.⁵ Terlebih lagi mereka menambahkan dengan ayat-ayat agama dalam menyebarkan berita-berita *hoax* guna mendapatkan dukungan masyarakat. Dengan mempolitisasi ayat-ayat Al-Qur'an dalam menebarkan informasi-informasi *hoax* baik yang ditujukan untuk menjatuhkan lawannya maupun untuk mendapatkan simpati rakyat. Sehingga terjadilah perpecahan antar umat maupun komunitas masyarakat hanya karena kegiatan politik praktis.⁶

Contohnya, beberapa tahun yang lalu dalam kegiatan Pilkada Jakarta tahun 2017 lalu, muncul isu-isu politik yang berkedok tentang penistaan agama yang ramai dibicarakan di media sosial kala itu. Ada seorang non-muslim yang berpendapat terhadap surah al-Maidah ayat 51 tentang kepemimpinan seorang muslim. Namun, dalam pendapat tersebut digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menjatuhkan kepemimpinan dalam ranah politik terhadap para pemimpin yang non-muslim. Mereka memanfaatkan situasi tersebut untuk memberikan makna surah al-Maidah ayat 51 tersebut, bahwa hanya seorang muslim lah yang patut menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Akibat dari kesalahpahaman dalam menafsirkan ayat

³ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal TAPIS*, 2 (Juli-Desember 2013), 35.

⁴ Ajat Sudrajat, "Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah", *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1 (2016), 5-6.

⁵ Dian Dwi Jayanto, "Mempertimbangkan Fenomena Populisme Islam di Indonesia dalam Perspektif Pertarungan Diskursif: Kontestasi Wacana Politik antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) dan Nahdlatul Ulama (NU)", *Jurnal Filsafat*, 1 (Februari 2019), 4-6.

⁶ Nurkholik Affandi, "Harmoni dalam Keberagaman (Sebuah Analisis tentang Konstruksi Perdamaian Antar Umat Beragama)", *Jurnal Komunikasi dan Keagamaan*, 1 (Juni 2012), 72.

tersebut, banyak kekacauan-kekacauan yang terjadi di ranah politik, agama maupun dinamika sosial kala itu.⁷

Dalam menyikapi problem di atas, seorang aktivis muslim yang aktif dalam menggunakan media sosial sebagai media dakwah, yaitu Nadirsyah Hosen, seorang pejabat Syuriah Nahdlatul Ulama Cabang Istimewa Australia. Beliau merupakan lulusan sarjana S1 dari Fakultas Syari'ah, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan meraih gelar *Graduate Diploma in Islamic Studies* serta *Master of Arts with Honours* dari Universitas New England. Kemudian ia meraih gelar *Master of Laws* dari Universitas Northern Territory. Dia meraih Ph.D dalam bidang ilmu hukum di University of Wollongong dan Ph.D dalam bidang hukum Islam di National University of Singapore.⁸

Dalam karya-karyanya baik dalam media cetak maupun media sosial, Nadirsyah Hosen menafsirkan ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan isu-isu politik saat ini, khususnya dalam membahas mengenai kepemimpinan serta kekuasaan. Perbedaan pendapat dalam menyikapi probem kepemimpinan dan kekuasaan menyebabkan banyak penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian besar politisi. Keinginan untuk memiliki kuasa atas orang lain menyebabkan hati mereka buta terhadap peri kemanusiaan. Sehingga, tidak sedikit dari mereka melakukan politisasi ayat Al-Qur'an untuk memperkuat argumen mereka dalam mempengaruhi rakyat. Oleh karena itu penulis ingin membahas mengenai pandangan dan pendapat mengenai kriteria pemimpin yang sesuai dengan konteks masyarakat muslim saat ini, serta pandangan Nadirsyah Hosen terkait relevansi kekuasaan politik saat ini.⁹

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan atau *library researc* yaitu penelitian yang objek utamanya buku-buku atau sumber kepustakaannya lainnya.¹⁰ Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber primer yang dibutuhkan berupa : postingan Nadirsyah terkait tafsir ayat politik di Media Sosialnya dan Buku karya beliau yang berjudul Tafsir Al-Qur'an di Media Sosial. Sedangkan sumber data sekunder berupa buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Sedangkan teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Sedangkan untuk analisis data, penelitian ini menggunakan menggunakan teknis analisis data deskriptif. Dengan cara deskriptif ini diharapkan untuk menggambarkan

⁷ Lilik Ummi Kaltsum, "Politik dan Perubahan Paradigma Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an Dalam Proses Pilkada DKI Jakarta", *Junal at-Tibyan*, 1 (Juni 2019), 56.

⁸ Nadirsyah Hosen, "Tafsir Al-Qur'an di Medsos" (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2020), 395.

⁹ Wahyullah Junaedi, "Pandangan Nadirsyah Hosen tentang Makna Kata Awlia dalam Q.S. Al-Maidah 51 (Study Analisis dalam Perspektif Hukum Islam)", (Tesis, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2019), 25-30.

¹⁰ Hadani Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1944)

pemikiran Nadirsyah Hosen terhadap penafsiran ayat-ayat politik serta mengetahui relevansi penafsiran ayat politik Nadirsyah Hosen sesuai dengan konteks ke-Indonesiaan saat ini.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metodologi Tafsir Politik Nadirsyah Hosen

Dalam kegiatan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an oleh seorang mufassir biasanya menggunakan metodologi tertentu sesuai dengan konteks sosialnya. Pemilihan sebuah metode dalam ranah penafsiran tergantung bagaimana kecenderungan dan sudut pandang seorang mufassir sesuai kondisi lingkungan sosialnya, serta tergantung bagaimana latar belakang perjalanan pendidikan dari mufassir itu sendiri.

Penggunaan metodologi penafsiran pada periode klasik cenderung lebih aplikatif, maksudnya dalam hasil penafsiran tersebut tidak mencantumkan metode apa yang digunakan secara eksplisit. Berbeda dengan kitab-kitab tafsir modern-kontemporer yang selalu mencantumkan metodologi penafsirannya secara lengkap dalam karya tafsirnya. Hal tersebut terjadi, bermaksud untuk memudahkan para mufassir modern-kontemporer dalam memilah metode yang sesuai dengan konteks sosial dan pengetahuannya.¹²

Begitu juga dengan Nadirsyah Hosen, sebagai salah satu seorang mufassir kontemporer menggunakan sebuah metode tertentu dalam melakukan kegiatan penafsiran yang sesuai dengan konteks sosial dan keilmuannya.

Pertama, Dalam melakukan kegiatan penafsiran, sistematika penyusunan tafsir Nadirsyah hosen dapat dikategorikan sebagai sistematika Tartib *Maudhu'i*. Seperti kerangka kerja metode *Maudhu'i*, Nadirsyah Hosen mengumpulkan beberapa ayat yang berhubungan dengan penafsiran beliau, memahami konteks turunnya ayat serta memahami *munasabah* antara satu ayat dengan ayat yang lainnya.

Kedua, membahas mengenai metode penafsiran tentu mencakup sumber penafsiran itu sendiri. Dalam melakukan kegiatan penafsiran ayat Al-Qur'an, pastinya mengambil sumber/referensi sebagai acuan dalam proses penafsiran. Begitu juga dengan Nadirsyah Hosen, beliau mengambil beberapa sumber untuk menjadi acuan serta dasar dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an. Tafsir Nadirsyah Hosen dalam media sosial serta bukunya yang berjudul "Tafsir Al-Qur'an di Medsos" ini bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, Riwayat sahabat dan Tabi'in serta ulama tafsir klasik terdahulu. Seperti ayat-ayat atau hadist yang berkaitan dengan politik, seperti An-Nisa ayat 59, Al-Maidah ayat 51 dan sebagainya. Serta beliau mengambil referensi dari berbagai ulama' tafsir

¹¹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, 33 (Januari – Juni 2018), 28.

¹² M. Alfatih Suryadilaga Dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*. (Yogyakarta: Teras, 2004), 34-36.

seperti Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah, Al-Qurthubi, Al-Munir, Sayyid Tanthawi dan lain sebagainya.¹³

Ketiga, sedangkan metode penafsiran Nadirsyah Hosen dalam menafsirkan ayat-ayat politik dengan menggunakan metode tematik serta memiliki corak *adabi ijtima'i*. Metode tersebut menitik beratkan pada penafsiran ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema permasalahan yang dibahas, serta corak *adabi ijtima'i* yang membahas mengenai permasalahan isu-isu sosial yang ada.

Kriteria Pemimpin Perspektif Nadirsyah Hosen

Kata kepemimpinan merupakan kata yang akrab ditelinga kita. Kepemimpinan sendiri sering kali berkaitan dengan hal-hal berbau politik. Dalam Islam sendiri, kata kepemimpinan disebut dengan *ūlil amri*. Seringkali dalam perbincangan sehari-hari dalam masyarakat selalu menggunakan istilah kepemimpinan atau *ūlil amri ini*. Hampir seluruh masyarakat muslim Indonesia mengetahui serta memiliki perbedaan pandangan mengenai makna kepemimpinan, kriteria pemimpin maupun konteks kepemimpinan di Indonesia. Oleh karena itu, akan dibahas mengenai pandangan Nadirsyah Hosen mengenai kepemimpinan dalam konteks ke-Indonesiaan.¹⁴

Dalam memahami makna kepemimpinan atau *ūlil amri* ini beberapa ulama' memiliki perbedaan pandangan terhadap maknanya. Nadirsyah Hosen mengutip beberapa pendapat mufasir sebagai rujukan utama dalam memahami kata kepemimpinan atau *ūlil amri* ini. Kata *ūlil amri* ini dirujuk dalam Q.S An-Nisa' ayat 59, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Rasul dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian, jika mau berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an), dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.¹⁵

Tafsir *At-Thabari*, sebuah kitab tafsir yang ditulis oleh ulama' besar Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Thabari dan banyak dirujuk oleh para mufassir setelahnya. Dalam kitab tafsir at-Thabari, menjelaskan bahwa makna *ūlil amri* dalam ayat tersebut merupakan seorang *ahlul ilmī wal fiqh* (mereka yang ahli ilmu dan pengetahuan akan fiqh). Sebagian ulama' lain mengatakan bahwa makna *ūlil amri* merupakan sahabat

¹³ Muhammad Amin, “Kontribusi Tafsir Kontemporer dalam Menjawab Persoalan Ummat,” Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry, *Jurnal Substantia*, 15.

¹⁴ Nadirsyah Hosen, *Tafsir Al-Qur'an Di Medsos* (Yogyakarta: Bintang Pustaka, 2020), 134.

¹⁵ Al-Qur'an Kemenag, Q.S. An-Nisa'/4:59.

Rasulullah. Sebagaimana lain juga berpendapat bahwa makna *ūlil amri* sendiri adalah Abu Bakar dan Umar.

Imam al-Mawardi dalam kitab tafsirnya menyebutkan ada empat makna mengenai makna *ūlil amri* dalam Q.S An-Nisa' ayat 59. Pertama, *ūlil amri* memiliki makna *umarā* (para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah duniawi). kedua, makna *ūlil amri* tersebut adalah ulama' dan fuqaha'. Ini menurut pendapat dari Jabir bin Abdullah, al-Hasan, dan Abi al-Aliyah. Ketiga, pendapat dari mujahid yang mengatakan makna *ūlil amri* adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Pendapat yang keempat, berasal dari Ikrimah yang lebih menyempitkan makna *ūlil amri* hanya pada dua sahabat saja, yaitu Abu Bakar dan Umar.¹⁶

Sedikit banyak berbeda dengan pendapat dari kitab tafsir al-Maraghi, yang muncul pada abad 20 an. Menjelaskan bahwa makna dari kata *ūlil amri* dari ayat tersebut tidak hanya berkuat pada *ahlul haq wal adl*, ulama', pemimpin perang saja. Akan tetapi, juga memasukkan beberapa profesi wartawan, buruh, pedagang maupun petani.

Atas beberapa pendapat dari beberapa mufasir di atas, Nadirsyah hosen mengatakan bahwa dalam memaknai kata *ūlil amri* dalam ayat tersebut memang sangat beragam, tergantung konteks dimana seorang mufasir menafsirkan ayat tersebut. Akan tetapi, menurut beliau yang lebih penting untuk dipahami adalah kata "taat" pada ayat tersebut. Kata taat kepada *ūlil amri* pada ayat tersebut tidak bisa digandengkan/disamakan dengan taat kita kepada Allah dan Rasul Nya. Maksudnya, kata taat kepada *ūlil amri* tidak bisa berdiri sendiri, artinya apabila kepemimpinannya bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul Nya, maka tidak dibenarkan untuk taat kepada mereka.¹⁷

Untuk mengetahui bagaimana seorang pemimpin yang layak untuk ditaati, memang harus ada ketentuan-ketentuan khusus menjadi seorang pemimpin dalam suatu wilayah. Oleh karena itu, Nadirsyah Hosen mengutip 3 tokoh ulama' besar yang memiliki pendapat mengenai syarat/ketentuan menjadi seorang pemimpin yang masalah bagi rakyatnya.

a. Al-Maragi (972-1058)

Beliau merupakan salah satu ulama' besar yang hidup pada zaman kekhalifahan Abbasiyah. Tepatnya pada masa khalifah al-Qa'im, Imam al-Maragi menulis kitab yang sangat terkenal *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, di dalamnya dijelaskan beberapa syarat menjadi seorang pemimpin yang di antaranya; 1) Rasa keadilan (*'adālah*), 2) Pengetahuan (*'ilm*), 3) Sehat pendengaran, penglihatan dan pembicaraan, 4) Sehat tubuh, tidak cacat atau yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, 5) Berwawasan luas dalam hal administrasi negara, 6) Punya keberanian

¹⁶ Nadirsyah Hosen, *Islam Yes Khilafah No* (Yogyakarta: Suka Press, 2018), 14.

¹⁷ Ibid, 14-15.

untuk melindungi wilayah Islam dan melaksanakan jihad, 7) Punya garis keturunan dari Quraisy.¹⁸

b. Al-Ghazali (1058-1111)

Pada saat Imam al-Mawardi wafat pada tahun 1058, muncul ilmuan baru bernama Imam al-Ghazali yang terkenal dengan karya *Ihya' Ulūmuddīn*. Dalam kitab tersebut, Imam al-Ghazali juga menjelaskan 10 persyaratan menjadi khalifah, berupa; 1) Baligh, 2) Berakal, 3) Merdeka, 4) Lelaki, 5) Keturunan suku Quraisy, 6) Sehat panca indera, 7) Keberanian untuk perang, 8) Punya kompetensi, 9) Punya pengetahuan, 10) Wara.¹⁹

c. Ibnu Khaldun

Dua abad kemudian kondisi umat Islam mengalami perubahan yang signifikan, dengan terpecahnya kepemimpinan umat Islam menjadi beberapa bagian. Dalam menganggulangi perpecahan antar umat Islam semakin besar, Ibnu Khaldun menuliskan 5 syarat penting menjadi seorang pemimpin dalam *al-muqoddimah* kitabnya, di antaranya ; 1) Berilmu, 2) Adil, 3) Kompetensi, 4) Sehat panca indera, 5) Memiliki sifat suku Quraisy

Dari ketiga pendapat ulama' besar mengenai syarat menjadi seorang pemimpin di atas, Nadirsyah Hosen mengatakan bahwa dari ketiga pendapat dengan zaman yang berbeda tersebut memiliki perkembangan serta perubahan dalam setiap ketentuan. Maksudnya, dalam setiap zaman pasti memiliki perkembangan baik dari segi ekonomi, budaya, agama maupun sosial politik. Sehingga sangat memungkinkan ketentuan-ketentuan menjadi seorang pemimpin pun akan selalu berkembang dan berubah setiap waktu.

Begitu pun apabila ketiga ketentuan klasik yang memiliki perbedaan ruang waktu yang sangat lama diterapkan dalam konteks ke-Indonesiaan, maka cenderung akan berbenturan dengan budaya sosial yang ada. Benturan tersebut terjadi karena perbedaan konteks sosial yang signifikan. Menurut hemat Nadirsyah Hosen, boleh memilih pendapat salah satu dari mereka, asalkan tetap berpegang teguh pada keadilan serta amanah dalam menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin.²⁰

Relevansi Tafsir Politik Nadirsyah Hosen

Pembahasan mengenai kekuasaan memang selalu menjadi kajian hangat para ilmuan, politisi, ulama' maupun masyarakat luas hingga sekarang. Bahkan cukup banyak para mufasir yang ikut andil dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kekuasaan, dengan harapan mampu memberikan pengaruh untuk pihak pemerintahan menuju yang lebih baik.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, salah seorang mufasir Nadirsyah Hosen memiliki andil dalam menyikapi sistem kekuasaan politik di negara ini. Beliau menggunakan media sosial dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan

¹⁸ Ibid, 22.

¹⁹ Nadirsyah Hosen, *Tafsir Al-Qur'an Di Medsos.....*, 136.

²⁰ Nadirsyah Hosen, *Islam Yes Khilafah No.....*, 25-26.

kekuasaan. Terkadang beliau lebih banyak memberikan kritik yang membangun terhadap penafsiran ayat-ayat politik yang dirasa kurang tepat dengan konteksnya sekarang.²¹

Akan tetapi dalam menjelaskan seperti apa konsep kekuasaan dalam Al-Qur'an, tidak banyak di bahas oleh Nadirsyah Hosen. Beliau lebih menekankan kritik terhadap sistem kekuasaan yang dirasa merugikan masyarakat Indonesia. Ditambah dengan adanya politisasi agama (Islam), menyebabkan kekacauan yang amat besar baik dalam sosial politik maupun dalam agama itu sendiri. seperti kritik terhadap penafsiran Q.S Al-Maidah ayat 51, Q.S An-Nisa' ayat 138-139 terkait dengan Pilkada serta Q.S An-Nisa' 108 mengenai KPU yang ketiganya menjadi trending topik di media sosial.²²

Pergulatan dalam ranah politik memang tidak pernah lepas dari yang namanya perebutan kekuasaan, atau yang disebut dengan politik elektoral. Kekuasaan memang membutuhkan sesuatu legitimasi, dan dalam sistem demokrasi, legitimasi didapatkan dari dukungan publik. Persaingan politik tersebut merupakan sebuah pertarungan untuk mempengaruhi publik.

Membentuk sebuah persepsi merupakan agenda utama seorang politisi. Segala narasi yang berpotensi untuk meraih dukungan publik melalui segala kanal berupa, media sosial, figur populis dan isu-isu sensitif. Menjadi tidak mengherankan apabila terjadi politisasi agama (Islam) sebagai pijakan menduduki kekuasaan. Menggunakan sebuah ayat agama yang diinterpretasikan relevan untuk problematika politik serta memberikan keuntungan kepada politisi, karena mampu menarik perhatian publik.²³

Dalam hal politisasi ayat Al-Qur'an yang digaungkan oleh politisi-politisi dalam misi perebutan kekuasaan, banyak sekali tersebar dalam media sosial. Ada beberapa contoh rumur/isu-isu politisasi tafsir, diantaranya:

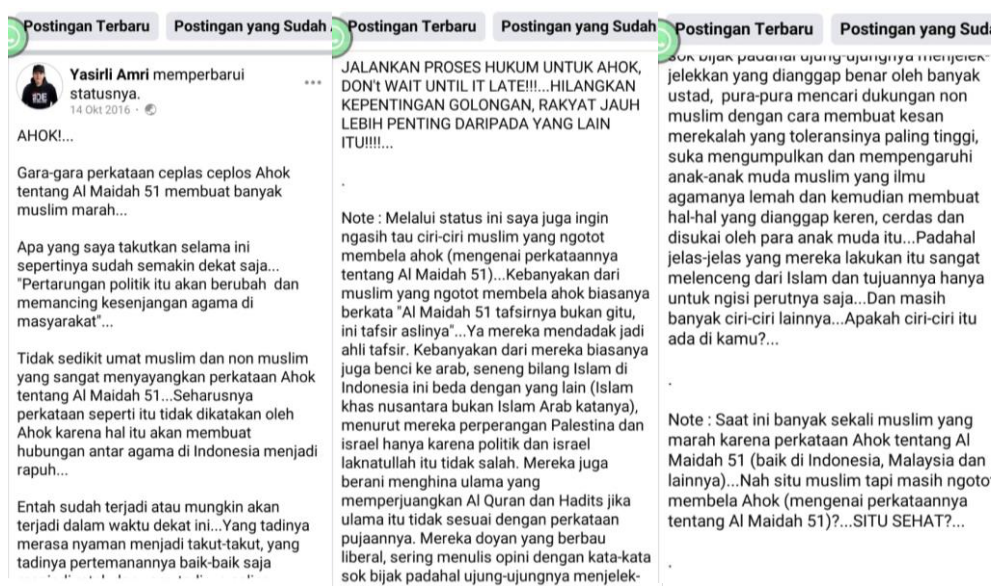
Pertama, terkait dengan penafsiran Q.S Al-Maidah ayat 51 yang disampaikan oleh akun facebook "Yasirli Amri" yang mengatakan bahwa perkataan Ahok terkait dengan surah tersebut tidak bisa dimaafkan, dan harus dituntut dalam ranah hukum. Serta seorang muslim hendaknya tidak memihak Ahok dengan dalih adanya kesalahan penafsiran pada ayat tersebut.

Pemilik akun tersebut mengatakan bahwa keberpihakan orang-orang muslim terhadap Ahok yang dijugde penistaan agama, akan menjadikan pertarungan politik menjadi memancing kesenjangan agama di masyarakat. Menurutnya tidak sedikit umat muslim maupun non-muslim yang sangat menyayangkan perkataan Ahok tentang Al-Maidah 51, yang seharusnya tidak ia katakan karena akan merusak hubungan antar agama menjadi rapuh.

²¹ Nor Hasan, "Agama dan Kekuasaan Politik Negara", *Arvhives*, No. 2(2014), 302.

²² Nadirsyah Hosen, *Islam Yes Khilafah No (Jilid 2)*, (Yogyakarta: Suka Press, 2020), 17.

²³ <https://islami.co/politisasi-ayat-terjemahisme-dan-post-truth/>, di akses pada 23 Maret 2022.



Gambar 1 : Penafsiran Yasiril Amri terhadap Q.S Al-Maidah (51)

Selain itu, ia juga menjustifikasi orang-orang muslim yang masih *ngotot* membela Ahok (mengenai perkataannya terhadap Al-Maidah 51) merupakan orang-orang yang sesat. Menurutnya, kebanyakan orang muslim yang membela Ahok karena berkata “sebenarnya tafsirnya bukan seperti itu, ini tafsir aslinya...”. Ia juga mengatakan bahwa orang-orang muslim yang mendukung Ahok biasanya benci dengan arab, menganggap Islam di Nusantara berbeda dengan negara lain. Dan yang lebih parah lagi, ia mengatakan bahwa mereka *doyan* hal-hal yang berbau liberal, sering menulis opini dengan kata-kata sok bijak yang pada akhirnya menjelek-jelekkkan juga.²⁴

Kritik yang dilakukan oleh Nadirsyah Hosen terhadap penafsiran ayat ini dalam media sosial, dikarenakan apa yang ditafsirkan kurang sesuai dengan konteks yang terjadi sekarang. Bahkan, hasil penafsirannya cenderung memihak salah satu kubu dengan mengumbar ujaran kebencian terhadap kubu yang lain. Nadirsyah Hosen mengatakan bahwa makna ayat tersebut memang berkaitan dengan politik, akan tetapi tidak sama sekali berkaitan dengan pemimpin muslim. Penafsiran tersebut hanya politisasi agama yang digunakan sebagai pijakan dalam memperoleh suara rakyat. Dan suara rakyat tersebut juga digunakan sebagai pijakan mereka dalam meraih panggung kekuasaan.²⁵

Kedua, terkait dengan penafsiran Q.S. An-Nisa’ ayat 138-139 mengenai kepemimpinan non-muslim oleh akun facebook “Lina Pribadi N”. Diawal tulisan, lina menuliskan kata “Iqro’..Bacalah...Bagi Mereka Yang Berfikir” yang seakan-akan ia menegaskan bahwa orang-orang muslim yang bersebrangan dengan dia tidak pernah menggunakannya untuk berfikir.


²⁴ Didik Hariyanto & Finalni Pritituesdina, “Analisis *Framing* Berita Kasus Ahok dalam Polemik Surat Al-Maidah 51 pada Kompas.Com dan Republika.Com”, *Mediakom*, No. 2(2018), 75.

²⁵ Nadirsyah Hosen, *Islam Yes Khilafah No (Jilid 2)*....., 100.

Dalam menjelaskan ayat tersebut, ia mengatakan bahwa Allah berfirman kepada umat Islam agar memilih pemimpin muslim juga. Menurutnya perbedaan pendapat umat Islam terhadap ayat tersebut hanyalah sebagai alasan atau tuduhan serta fitnah bahwa larangan memilih pemimpin non-muslim tersebut hanya digunakan untuk pembenaran sikap yang mendukung Ahok habis-habisan. Dan dia juga mengatakan bahwa Al-Qur'an kok bermuatan politik, intinya larangan memilih pemimpin non-muslim adalah perintah khusus buat umat Islam. Hal tersebut ia buktikan dengan menunjukkan tafsir Q.S An-Nisa' ayat 138-140 sebagai bukti bahwa apa yang ia utarakan benar. Akan tetapi, menurut peneliti apa yang ditampilkan tersebut hanyalah sebuah terjemahan Al-Qur'an, bukan tafsir secara utuh.²⁶

Dalam menafsirkan ayat ini, Nadirsyah Hosen mengatakan bahwa tidak ada keterkaitan sama sekali antara ayat ini dengan proses Pilkada. Mereka yang mengaitkannya, menurut beliau hanya menggunakannya ayat tersebut sebagai anak panah untuk para pemimpin yang beragama selain Islam. Karena menurut pendapat mereka, kekuasaan negara dari segi manapun hanya berhak di pegang oleh umat Islam. Sehingga ayat ini, yang notabene di pahami oleh masyarakat sebagai ayat kepemimpinan muslim, digunakan oleh mereka untuk mengambil suara rakyat sebanyak-banyaknya.

← Postingan Lina

 **Lina Pribadi N**
21 Feb 2017 · 🌐

IQRO ... BACALAH.. BAGI MEREKA YANG BERFIKIR

Ketika Allah berfirman dalam Alquran untuk tidak memakan daging babi maka semua umat islam setuju bahwa makan daging babi itu HARAM

Padahal perintah Allah untuk tidak memakan daging babi hanya diatur dalam Alquran sebanyak 4 ayat yaitu: surah Al Baqarah ayat 173, Al Maidah ayat 3, Al An'am ayat 145 dan An Nahl ayat 115

Ketika Allah berfirman dalam Alquran agar wanita muslim menutup aurat mereka dengan berhijab maka beramai ramailah wanita muslim berhijab untuk menunjukkan keislamannya padahal anjuran untuk berhijab tersebut didalam Alquran hanya diatur dalam 3 ayat yaitu Surah Al A'raf ayat 26, An Nur ayat 31 dan Al Ahzab ayat 59

Akan tetapi ketika Allah berfirman kepada umat islam agar memilih pemimpin muslim maka sebahagian umat islam berbeda pendapat, begitu banyak alasan alasan yang dikemukakan bahkan disertai tuduhan serta fitnah bahwa larangan memilih pemimpin non muslim tersebut sarat dengan muatan politik ini dilakukan mereka sebagai

← Postingan Lina

pembenaran sikap mereka yang mendukung habis habis seorang Ahok, masyaallah .. Alquran kok bermuatan politik, apa urusan Allah terhadap soal politik di Indonesia wong dunia dan seluruh isinya Allah yang punya kok, larangan memilih PEMIMPIN NON MUSLIM itu adalah PERINTAH ALLAH KHUSUS BUAT UMAT ISLAM TITIK.. karena itu mengenai larangan memilih PEMIMPIN NON MUSLIM tersebut dalam Al Quran diatur dalam banyak ayat yang antara lain adalah Surah Al Maidah ayat 51, Al Maidah ayat 57, An Nisa ayat 138, An Nisa ayat 139, An Nisa ayat 140 dan Al Imran ayat 28, jadi cobalah Alquran bukan hanya sekedar di baca tetapi juga difahami, bagi yang tidak mengerti bahasa Arab maka fahamilah melalui tafsir, nih tafsir An Nisa ayat 138 s/d 140 saya bagikan semoga segera istighfar dan bertobat, Bismillah hirahman Nirrahim..

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (138) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَلْبَسُوا لَهُمُ الْعُرَّةَ فَإِنِ الْعُرَّةُ لَسَاءٌ لِّهِمْ جَمِيعًا (139) وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَن إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يَكْفُرُ بِهَا وَيَسْتَهْزِئُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِذْكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا [النساء : 138 - 140]

138. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih.

139. (yaitu) orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah.

140. Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (duduk) bersama mereka berbahaya dan dekat dengan mereka adalah neraka. Itulah ancaman yang berlebih-lebihan, dan Allah maha mendengar.

²⁶ Vidya Mandarani & Nyoman Suwarta, "Analisis Wacana Makrostruktural Pemberitaan Ahok Pada Pilkada DKI 2017", *KANA*, 5(Maret 2017), 116.

Gambar 2 : Penafsiran Lina Pribadi N terkait Q.S An-Nisa' (138-139)

Ketiga, terkait dengan sindiran dengan menggunakan Q.S An-Nisa' ayat 108 oleh akun Twitter yang mengatas namakan “Partai Gerindra” terhadap keputusan KPU mengumumkan hasil penghitungan suara pada tengah malam.

Sindiran tersebut bermaksud bahwa seakan-akan pengumuman hasil penghitungan suara oleh KPU telah diabadikan oleh Allah dalam Q.S An-Nisa' ayat 108. Karena menurut pemilik akun twitter tersebut, KPU sengaja mengumumkan hasil perhitungan suara di tengah malam untuk merahasiakan kebenaran dari manusia, padahal Allah tetap akan tahu walaupun sembunyi-sembunyi sekalipun. Hanya karena ada kata “mengatur siasat pada malam hari”, mereka menganggap bahwa kejadian tersebut telah diatur dalam surah An-Nisa' 108.²⁷

Mengenai masalah ini, Nadirsyah Hosen menyimpulkan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan pembelaan Al-Qur'an terhadap Zaid yang seorang Yahudi. Makna dalam ayat ini adalah bertindak adil kepada siapapun tanpa terkecuali. Sehingga menurut beliau sudah jelas apabila ayat ini tidak ada hubungan sama sekali dengan konteks keputusan KPU tahun 2019.



Gambar 3 : Sindiran Partai Gerindra menggunakan Q.S An-Nisa' (108)

Dari ketiga kritik diatas, Nadirsyah Hosen mengatakan bahwa dalam memperoleh kekuasaan tidaklah diperbolehkan dengan mem-politisasi tafsir/ayat Al-Qur'an dengan kehendaknya sendiri. Dalam memperoleh suara dan dukungan dari masyarakat, hendaknya para politisi menunjukkan prestasi dan kompetensi mereka kepada masyarakat, agar masyarakat dapat tertarik memilih calon pemimpin yang berkompeten dalam bidangnya. Bukan menjadikan agama sebagai pijakan untuk meraih kekuasaan, sehingga menyebabkan kesalahpahaman dan perpecahan antar masyarakat.²⁸

²⁷ Agwin Degaf, “Kasus Ahok dalam Perspektif Ilmu Linguistik”, *Senabastra*, 9 (2017), 266.

²⁸ Nadirsyah Hosen, *Islam Yes Khilafah No (Jilid 2)*....., 167.

KESIMPULAN

Dalam menafsirkan ayat-ayat politik, Nadirsyah Hosen menggunakan metode tafsir *maudhu'i* dengan corak *adabi ijtima'i*. Pola sistematika pembahasan tafsirnya menggunakan sistematika tartib *maudhu'i*, yang bersumber pada ayat Al-Qur'an, Hadist, riwayat sahabat serta tabi'in.

Kriteria pemimpin menurut penafsiran Nadirsyah Hosen mengatakan bahwa seorang pemimpin harus mampu berlaku adil, berkharisma, bertanggung jawab serta amanah dalam mengemban tugasnya. Mengutip dari tiga ulama' tafsir Al-Maragi (972-1058), Ibnu Khaldun, dan Al-Ghazali (1058-1111), Nadirsyah Hosen menyimpulkan bahwa tidak syarat harus beragama Islam untuk menjadi seorang pemimpin. Akan tetapi, siapapun orangnya dapat menjadi seorang pemimpin asalkan mampu berlaku adil, bertanggung jawab dan amanah.

Sedangkan mengenai kekuasaan, Nadirsyah Hosen lebih menekankan kepada mengkritik terhadap sistem dan kebijakan pemimpin yang berkuasa. Beliau mengatakan dalam memperoleh kekuasaan tidak diperkenankan mempolitisasi tafsir sebagai suatu alat atau senjata. Akan tetapi, mereka harus mampu menunjukkan prestasi serta kompetensinya menjadi seorang pemimpin yang akan memegang tonggak kekuasaan. Sehingga, masyarakat akan tergerak untuk mengikuti bahkan mampu berpartisipasi terhadap arahan seorang pemimpin tanpa adanya rasa terpaksa.

REFERENSI

- Affandi, Nurkholik, "Harmoni dalam Keberagaman (Sebuah Analisis tentang Konstruksi Perdamaian Antar Umat Beragama)", *Jurnal Komunikasi dan Keagamaan*, 1 (Juni 2012).
- Al-Qur'an Kemenag, Q.S. An-Nisa'/4:59.
- Amin, Muhammad, "Kontribusi Tafsir Kontemporer dalam Menjawab Persoalan Ummat," Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry, *Jurnal Substantia*.
- Bakry, Hasbullah, *Sistematik Filsafat*, (Jakarta: Wijaya, 1981).
- Degaf, Agwin, "Kasus Ahok dalam Perspektif Ilmu Linguistik", *Senabastra*, 9 (2017).
- Didik Hariyanto & Finalni Pritituesdina, "Analisis *Framing* Berita Kasus Ahok dalam Polemik Surat Al-Maidah 51 pada Kompas.Com dan Republika.Com", *Mediakom*, No. 2(2018).
- Fattah, Damanhuri, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal TAPIS*, 2 (Juli-Desember 2013).
- Hasan, Nor, "Agama dan Kekuasaan Politik Negara", *Arvhives*, No. 2(2014).
- Hosen, Nadirsyah, "Tafsir Al-Qur'an di Medsos" (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2020).
- Hosen, Nadirsyah, *Islam Yes Khilafah No (Jilid 2)*, (Yoyakarta: Suka Press, 2020).
- Hosen, Nadirsyah, *Islam Yes Khilafah No* (Yoyakarta: Suka Press, 2018).
- <https://islami.co/politisasi-ayat-terjemahisme-dan-post-truth/>, di akses pada 23 Maret 2022.

Jayanto, Dian Dwi, "Mempertimbangkan Fenomena Populisme Islam di Indonesia dalam Perspektif Pertarungan Diskursif: Kontestasi Wacana Politik antara

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) dan Nahdlatul Ulama (NU),” *Jurnal Filsafat*, 1 (Februari 2019).

Junaedi, Wahyullah, “Pandangan Nadirsyah Hosen tentang Makna Kata Awlia dalam Q.S. Al-Maidah 51 (Study Analisis dalam Perspektif Hukum Islam)”, (Tesis, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2019).

Kaltsum, Lilik Ummi, “Politik dan Perubahan Paradigma Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur’an Dalam Proses Pilkada DKI Jakarta”, *Jurnal at-Tibyan*, 1 (Juni 2019).

M. Alfatih Suryadilaga Dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*. (Yogyakarta: Teras, 2004).

Nawawi, Hadani, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1944)

Rijali, Ahmad, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, 33 (Januari – Juni 2018).

Sudrajat, Ajat, “Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1 (2016).

Vidya Mandarani & Nyoman Suwarta, “Analisis Wacana Makrostruktural Pemberitaan Ahok Pada Pilkada DKI 2017”, *KANAL*, 5(Maret 2017).